

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS JALAN H.R SOEBRANTAS)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)*

Bidang Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



ILHAM

NPM : 167110320

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ilham
NPM : 167110320
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS JALAN H.R SOEBRANTAS)

Format Sistematika dan Pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Menyetujui

Program Administrasi Publik

Ketua

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Pembimbing

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ilham
NPM : 167110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas)

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Ketua

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Sekretaris

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Anggota

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 507/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Ilham
N P M : 167110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR. Soebrantas).
- Struktur Tim :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Syapril Abdullah, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Hendry Andry, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Herman, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Maret 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 507/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 April 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ilham
NPM : 167110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR. Soebrantas).**
Nilai Ujian : Angka : " 80,3 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Ketua	1.
2.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Herman, S.Sos., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 01 April 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan 1 Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ilham
NPM : 167110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Ketua

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

An. Tim Penguji

Sekretaris

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul **“Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas)”** penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan proposal ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
5. Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan penulis.

7. Terkhusus dan Istimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga Kepada kedua orang tua, kakak dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama penulis melaksanakan studi.
8. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terutama semua yang ada didalam Grup “Diam-Diam” yang telah memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasanyang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dinilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan penelitian:.....	14
2. Kegunaan penelitian:	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Administrasi	16
2. Konsep Organisasi.....	18
3. Konsep Manajemen	22
4. Manajemen Sumber Daya Manusia	25
5. Konsep Kinerja.....	26
B. Kerangka Pikir.....	29
C. Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37

C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Penarikan Sampel	39
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisa Data	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	42
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
A. Sejarah Kota Pekanbaru	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Keadaan Penduduk	47
3. Pemerintah Kota Pekanbaru	49
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	51
1. Visi dan Misi	52
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang	53
3. Struktur Organisasi	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Identitas Responden	56
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	58
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	59
B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator	61
1. Kualitas Kerja	62
2. Kuantitas Kerja	65
3. Kemampuan/Konsistensi	68
4. Sikap/Perilaku	72
C. Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru	76
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84
DOKUMENTASI	107

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I.1	Jumlah Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	6
Tabel I.2	Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Kecamatan Kota Pekanbaru.....	7
Tabel I.3	Jumlah Tamatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	9
Tabel II.1	Operasional Variabel.....	33
Tabel III.1	Populasi dan Sampel Analisis Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Disepanjang Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru.....	38
Tabel III.2	Jadwal waktu pelaksanaan penelitian tentang Analisis Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R Soebrantas).....	42
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	47
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	48
Tabel IV.3	Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru.....	50

Tabel V.1	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Staf Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.....	57
Tabel V.2	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima.....	57
Tabel V.3	Identitas Responden Menurut Usia Staf Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.....	58
Tabel V.4	Identitas Responden Menurut Usia Pedagang Kaki Lima.....	59
Tabel V.5	Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja.....	60
Tabel V.6	Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Pedagang Kaki Lima.....	60
Tabel V.7	Tanggapan Responden Staf Pegawai Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	62
Tabel V.8	Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	63
Tabel V.9	Tanggapan Responden Staf Pegawai Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	65
Tabel V.10	Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi	

	Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	66
Tabel V.11	Tanggapan Responden Staf Pegawai Mengenai Indikator Kemampuan/Konsistensi Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	68
Tabel V.12	Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Kemampuan/Konsistensi Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	70
Tabel V.13	Tanggapan Responden Staf Pegawai Mengenai Indikator Sikap/Perilaku Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	72
Tabel V.14	Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Sikap/Perilaku Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	73
Tabel V.15	Rekapitulasi Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.1: Kerangka Pikir.....	29
Gambar IV.1: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR. Soebrantas).....	84
2.	Daftar Wawancara Penelitian Tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR. Soebrantas).....	99
3.	Hasil Rekapitulasi Daftar Telly Jawaban Responden Staf Pegawai Dan Pedagang Kaki Lima Tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR. Soebrantas).....	104
4.	Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR. Soebrantas).....	107

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham
NPM : 167110320
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : **Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan HR.Soebrantas)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,15 Februari 2021

Pelaku Pernyataan

Ilham

**ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS JALAN HR.SOEBRANTAS)**

ABSTRAK

Ilham

Kata Kunci: Analisis Kinerja, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas). Adapun indikator yang digunakan adalah Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Konsistensi/Kemampuan Pegawai, Sikap/Perilaku Pegawai. Tipe penelitian ini adalah Survei Deskriptif dengan Analisis Kuantitatif. Adapun dua kelompok yang menjadi Populasi dan Sampel yaitu Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan melalui Kuesioner, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini berada pada kategori Cukup Baik. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya menertibkan Pedagang Kaki Lima yaitu kurangnya komunikasi antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima tentang daerah yang dilarang untuk berjualan, kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi peraturan tentang Ketertiban Umum dan juga Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan razia secara rutin

Analysis of the Performance of the Satuan Polisi Pamong Praja in an Effort to Curb Street Vendors in the City of Pekanbaru (HR.Soebrantas Road Case Study)

ABSTRACT

Ilham

Keywords: Performance Analysis, Controlling Street Vendors, Civil Service Police Units

This study aims to determine and analyze the performance of the Civil Service Police Unit in an Effort to Control the Street Vendors in the City Pekanbaru(Case Study HR.Soebrantas Street). The indicators used are Quality of Work, Quantity of Work, Consistency of Employee Ability and Attitudes of Employee Behavior. This type of research is a Descriptive Survey with Quantitative Analysis. The two groups that became the population and samples, namely street vendors and the Pekanbaru City Civil Service Police Unit. In this case the researchers collected data through observation, interviews, questionnaires, documentation. Basen on the results of the research conducted on this research it is in the Good Enough category. As for the factors inhibiting the Performance of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in an Effort to Curb Street Vendors,namely the lack of communication between the Civil Service Police Unit and Street Vendors regarding areas that are prohibited from selling, the lack of awarenes of street vendors to comply with regulations on Public Order and Also the Civil Service Police Unit does not carry out routine raids.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus-menerus menuju ketercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana. Atau administrasi juga dapat dikatakan sebagai proses, dimana administrasi tersebut menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu proses, terdapat rencana-rencana dan juga kebijakan serta upaya untuk mencapai tujuan yang dicapai. Baik buruknya administrasi sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Manusia tidak dapat bekerja dengan dirinya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Begitu juga seorang administrator saja yang melaksanakan aktivitas suatu organisasi, melainkan seluruh anggota organisasi.

Kegiatan administrasi berada pada organisasi yang mana organisasi menurut Gullick (dalam Usman, 2013:486) organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh organisasi

Administrasi dan organisasi adalah unit yang tidak terpisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan.

Konsep organisasi merupakan titik sentral dari tujuan diaplikasikan setiap aspek studi Administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi

Menurut Robbins (1994;4) Organisasi adalah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Dalam suatu organisasi, manajemen diperlukan untuk mengatur proses pengorganisasian organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik, diperlukan manajemen layanan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan layanan itu sendiri, yaitu kepuasan masyarakat.

Konsep manajemen telah diartikan oleh pihak yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. fungsi manajemen pada dasarnya untuk melakukan semua kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam batas-batas kebijakan pemerintah yang ditetapkan pada tingkat administrasi.

Manajemen sebagai suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan majerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain menurut Siagian (2003;5)

Kinerja merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja dapat diartikan sebagai suatu kemampuan kerja, prestasi yang diperlihatkan atau yang dicapai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan dalam periode tertentu

Kinerja menurut Payaman Simanjuntak (2005;106) adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan Manajemen kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Negara menurut Kraneburg (dalam Syafiie 2010 : 79) adalah sistem yang berkaitan dengan tugas dan struktur umum yang diatur, dalam upaya negara untuk mencapai tujuannya yang juga merupakan tujuan rakyat yang dicakup, maka harus ada pemerintahan yang berdaulat

Oleh karena itu, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan negara yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan dari pada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003 : 7)

Seperti yang telah dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasannya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Pembentukan pemerintah daerah tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan daerah, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah adalah seperangkat pemerintah pusat di dalam daerah dalam konteks implementasi dan fasilitasi pemerintahan. Indonesia adalah Negara Kesatuan dalam bentuk Republik dan untuk mencapai tujuan negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebenarnya lebih difokuskan pada kewenangan daerah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wilayah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya, sehingga wilayah kabupaten/kota dapat memahami dan menangani keluhan atau kritik secara langsung atau tidak langsung, serta menyumbangkan pemikiran masyarakat.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru ini mempunyai 12

Kecamatan dan 83 Kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 954.373 jiwa. Tentu saja, masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Riau. Pekanbaru adalah target utama penduduk kota untuk mencari pekerjaan yang berdampak pada peningkatan populasi, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, dan serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar tanpa izin dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak di tempat yang telah ditentukan. Setiap tahunnya penduduk Kota Pekanbaru terus meningkat yang menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk dari daerah lain berpindah ke Kota Pekanbaru. Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Ada beberapa hal yang harus ditertibkan yaitu:

- a. Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
- b. Tertib Sungai, Saluran Air dan Kolam
- c. Tertib Keamanan Lingkungan
- d. Tertib Usaha

Dalam pengelolaan urusan Kepemerintahan daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban Kota. Pemerintah Kota menunjuk salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah dalam memelihara keamanan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Untuk mengetahui Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Berikut ini adalah Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Berdasarkan Pangkat/Golongan.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah/Orang
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	28 Orang
3	Golongan II	63 Orang
4	Golongan I	1 Orang
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	365 Orang
Jumlah		462 Orang

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2020

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja di Provinsi Riau dibentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis pemerintah Kota Pekanbaru yang menegakkan peraturan daerah nomor 05 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maka kondisi ketentraman dan ketertiban dapat dicapai dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap pedagang kaki lima. Mengenai pedagang kaki lima yang berada jalan HR.Soebrantas Pekanbaru sudah sangat membuat masyarakat resah, dengan melakukan kegiatan berjualan di pinggir jalan seperti itu sudah melanggar Peraturan Daerah yang mana sudah diatur dalam Perda Pekanbaru No.5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dijelaskan bahwa di Perda tersebut dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, taman, tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak. Kecuali tempat yang sudah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Tabel 1.2 Berikut Ini adalah Jumlah PKL Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Pedagang Kaki Lima
1	Kecamatan Tampan	425
2	Kecamatan Pekanbaru Kota	600
3	Kecamatan Bukit Raya	320

4	Kecamatan Sukajadi	151
5	Kecamatan Senapelan	632
6	Kecamatan Lima Puluh	197
7	Kecamatan Marpoyan Damai	625
8	Kecamatan Rumbai	300
9	Kecamatan Payung Sekaki	398
10	Kecamatan Sail	105
11	Kecamatan Rumbai Pesisir	150
12	Kecamatan Tenayan Raya	504
Jumlah		4539

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2019

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan sosialisas, penyuluhan dan juga penertiban kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas di jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru yang telah menguasai pinggir jalan di daerah tersebut sehingga berdampak bagi masyarakat yang menggunakan jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Adapun tim khusus yang diturunkan ke Jalan HR. Soebrantas yaitu 2 pleton yang berjumlah 60 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan bantuan Polri-TNI dan Dishub.

Berikut ini adalah Jumlah Tamatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru:

Tabel 1.3. Jumlah Tingkat Pendidikan Terakhir Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah/Orang
1	S2	3 Orang
2	S1	49 Orang
3	DIII	82 Orang
4	SLTA	268 Orang
5	SLTP	55 Orang
6	SD	5 Orang
Jumlah		462 Orang

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 2020.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yaitu pada Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa

Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Didalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kepala Polisi Pamong Praja Pekanbaru menetapkan Ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas dilapangan, adapun ketentuan yang mengatur prosedur dalam menertibkan tempat umum adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pelaksanaan

a) Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
- 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
- 5) setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
- 6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

b) Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah :

- 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah pada umumnya.
- 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja
- 4) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah.
- 5) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu:

- 1) Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
- 3) Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;
- 4) Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
- 5) Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
- 6) Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
- 7) Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

3. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

- a) Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain : Alat Negara,Instansi terkait,PPNS,Kecamatan dan Kelurahan/Desa .
- b) Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru
- c) SOP Penertiban Secara Paksa.

4. SOP Pengawasan dan Penyuluhan

- a) Merencanakan dan melaksanakan program kerja
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
- c) Melaksanakan penyuluhan

- d) Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- e) Membagi tugas kepada bawahan
- f) Memberi petunjuk kepada bawahan
- g) Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Kinerja Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Titik lokasi yang akan diteliti atau batas penelitian yaitu pada (**JL. H.R Soebrantas, Kec. Tampan atau dari JL Putri Tujuh–JL Purwodadi**) yang merupakan area yang sering terlihat para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Ketertiban Umum. Berdasarkan observasi peneliti bahwa ketertiban yang sering dilanggar oleh Pedagang Kaki Lima yang berada di area jalan HR.Soebrantas masih banyaknya para pedagang yang berjualan di trotoar, bahu jalan dan hampir memenuhi badan jalan yang dimana seharusnya lokasi tersebut dilarang berjualan.

Berdasarkan analisis dan temuan, penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Survei awal pada tahun 2019 masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru sehingga dapat merugikan bagi pengguna jalan
2. Bahwa seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan razia secara rutin, namun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan razia hanya ketika mendapat pengaduan dari masyarakat

3. Rendahnya sikap tegas dan sanksi dalam menegakkan hukuman atau sanksi bagi para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran

Melihat permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas)”**

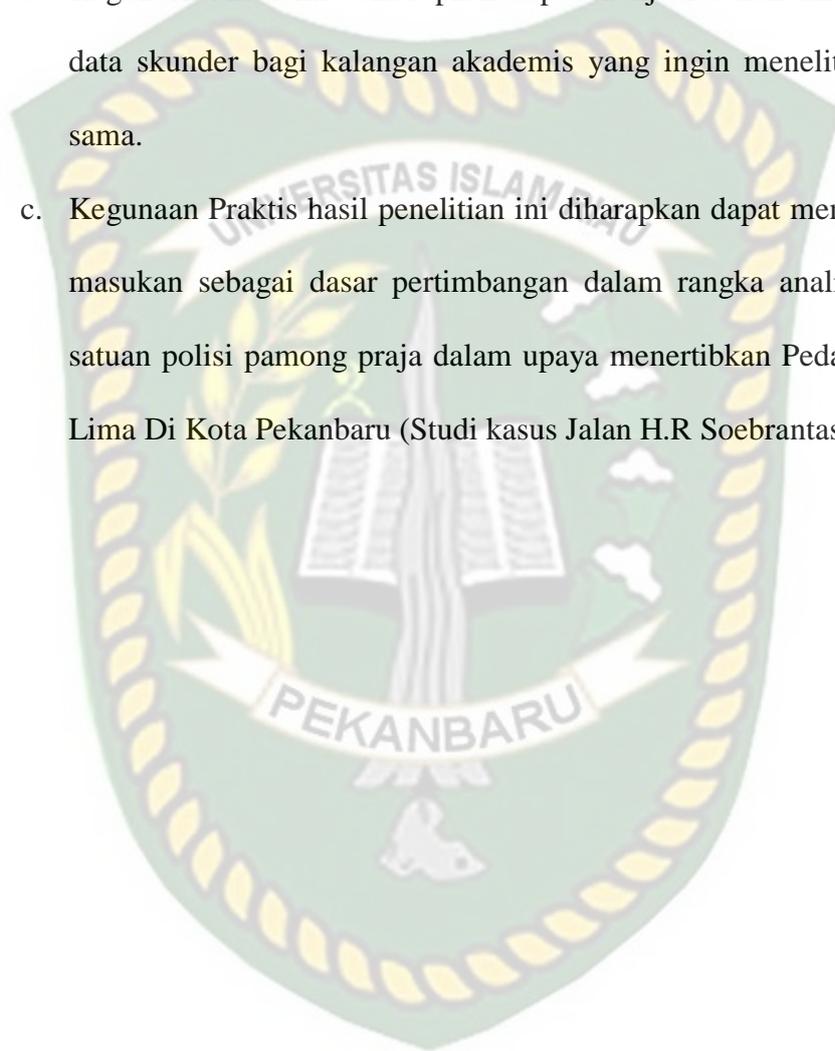
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **“Bagaimanakah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Jalan H.R Soebrantas)?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Jalan H.R Soebrantas)
 - b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala di dalam Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Jalan H.R Soebrantas).
2. Adapun kegunaan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya bagi pengembangan bidang ilmu Administrasi Publik
- b. Kegunaan Akademis diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka analisis kinerja satuan polisi pamong praja dalam upaya menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Jalan H.R Soebrantas)



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, penulis mengutip sejumlah pendapat dan teori para ahli yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian untuk menyelesaikan masalah dan menjadi dasar penelitian.

1. Konsep Administrasi

Manusia adalah makhluk sosial, dimana setiap interaksi dilakukan bersama dengan orang lain. Siagian (2004;10) mengatakan bahwa orang modern adalah *homo administrikus* serta *organization man*. Dikatakan demikian bahwa manusia lahir sampai kembali kepada sang pencipta tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi dan organisasi.

Pengertian administrasi secara umum adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Yang termasuk dalam kegiatan administrasi antara lain adalah kegiatan mencatat, menyurat, pembukuan ringan, menetik, membuat agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan di berbagai bidang.

Administrasi dalam arti sempit menurut Zulkifli (2005;16) yaitu sebagai rangkaian kegiatan pekerjaan ketatausahaan dan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Sedangkan dalam arti luas yaitu sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Siagian (2004;3)

Menurut White (dalam Syafie, 2006;14) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafie, 2006;14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Gulick (dalam Syafie 2006) mendefinisikan administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dan memengaruhi hasil-hasil pada suatu kejadian dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama.

Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai rangkaian kegiatan pekerjaan ketatausahaan dan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Administrasi dalam arti luas menurut Siagian (2008;2) sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Adapun unsur utama dan administrasi menurut Siagian (2003;3) adalah :

1. Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih
2. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama
3. Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai

Leonard D. White (1958) dalam Syafri (2012;9) menyatakan bahwa administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik, atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil

Administrasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafiie 2010:14) adalah suatu proses secara keseluruhan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan kegiatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Syafiie, Inu Kencana 2007:9) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern,eksistensi daripada admnistrasi ini berkaitan dengan organisasi.

Dalam ilmu administrasi terdapat berbagai macam administrasi yang ada, salah satu nya adalah administrasi publik. Dimana administrasi publik ini di Indonesia dipergunakan dalam mengelola negara ini yang menekankan pada orientasi kekuasaan Negara.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie 2010:25) administrasi publik adalah suatu organisasi dan manajemen serta peralatannya guna mencapai suatu tujuan pemerintah.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi adalah unit yang tidak terpisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan.

Konsep organisasi merupakan titik sentral dari tujuan diaplikasikan setiap aspek studi Administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi

Menurut Chester I. barnard (dalam Zukifli dan Nurmasari 2015:99) adalah suatu sistem kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu wadah atau tempat.

Sedangkan menurut James D. Money (dalam Zukifli dan Nurmasari 2015: 99) adalah bentuk kerjasama atau kelompok manusia untuk pencapaian suatu tujuan.

Menurut Zukifli dan Nurmasari (2015:99) organisasi ada dua, yaitu:

- a. Organisasi dalam arti badan ialah kelompok orang yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan.
- b. Organisasi dalam arti bagan ialah gambaran skematis tentang suatu bentuk hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tertentu dalam pencapaian tujuan.

Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam sebuah organisasi yaitu:

- Mencapai tujuan yang lebih mudah
- Melatih ketahanan mental
- Memecahkan masalah yang ingin diselesaikan
- Melatih kepemimpinan
- Memperluas relasi dan pergaulan hidup
- Mampu menghadapi tekanan dunia kerja

- Mengembangkan etos dan disiplin
- Menambah wawasan dan pengetahuan umum
- Membentuk karakteristik seseorang
- Melatih pengaturan waktu dengan baik
- Membentuk emotional intellegent
- Mengasah daya analisa dalam problem solving
- Menambah pengalaman

Menurut Wendrich (dalam Brantas, 2009,75) Organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutarto (dalam Brantas, 2009,75) Organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan system kerjasama atau system social.

Menurut Robbins (1994;4) Organisasi adalah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Robbins, S.P 1986 dalam Sopiah (2008;2) menyatakan bahwa Organisasi adalah suatu sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relative kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli,2005;25) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulikifli.2009;71)

Menurut Gitosudarmo, I, 1997 (dalam Sopiha 2008;2) Organisasi adalah suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Riva'i (2012;169) dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membentuk hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran (Rivai'i,2012;169-170)

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zukifli dan Moris 2014:39) prinsip-prinsip organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya kerjasama yang teratur dan secara berkelanjutan dengan orang-orang yang bersangkutan
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang setara
3. Antara tugas, tanggungjawab,dan kekuasaan harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan

4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan sejelas-jelasnya
5. Adanya kesatuan komando dan hirarki
6. Komunikasi harus dilakukan dengan semaksimalnya
7. Kewajiban pemimpin untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya
8. Pekerjaan tidak boleh terhenti karena adanya seseorang yang berhalangan
9. Saling asuh antara instansi line dan staf
10. Harus adanya koordinasi
11. Adanya kehayatan

3. Konsep Manajemen

Dalam suatu organisasi, manajemen diperlukan untuk mengatur proses pengorganisasian organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik, diperlukan manajemen layanan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan layanan itu sendiri, yaitu kepuasan masyarakat.

Konsep manajemen telah diartikan oleh pihak yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. fungsi manajemen pada dasarnya untuk melakukan semua kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam batas-batas kebijakan pemerintah yang ditetapkan pada tingkat administrasi.

Manajemen sebagai suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain menurut Siagian (2003;5)

Menurut George R. Terry (2006;32) manajemen adalah suatu penilaian proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan pemanfaatan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry (dalam Winardi 2000:161) meliputi hal-hal berikut :

1. Planning
2. Organizing
3. Actuating
4. Controlling

Menurut Andreson D. Richard (dalam Winardi 2000:161) membagi fungsi-fungsi manajemen dalam 5 elemen yaitu sebagai berikut :

1. Planning
2. Organizing
3. Staffing
4. Excecuting
5. Appraising

Menurut Stoner (Zulkifli 2005;28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan. Hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah: ketatalaksanaan, manajemen dan perusahaan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda.

Menurut George R.Terry (2006;32) manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.

Adapun unsur-unsur manajemen yaitu

- *Man*
- *Money*
- *Methods*
- *Materials*
- *Machines*
- *Market*

Menurut Sedarmayanti (2014:2) pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang bertujuan untuk jangka panjang yang dilakukan oleh top manejer dalam upaya untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian manajemen yang dijelaskan, maka penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian melalui penggunaan sumber daya manusia serta cara lain untuk mencapai tujuan organisasi tertentu

Manajemen pada dasarnya berfungsi untuk melakukan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dalam batas-batas kebijakan pemerintah yang ditetapkan pada tingkat administrasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni yang digunakan untuk alat didalam suatu organisasi dan juga manajemen ini merupakan

suatu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apa pun bentuk dan tujuannya, organisasi diciptakan dari berbagai pandangan kepentingan manusia. Demikian juga, dalam menjalankan misinya, itu dikelola dan diurus oleh manusia. Oleh karena itu manusia adalah faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Untuk mengelola sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi, sehingga tujuan organisasi tercapai, maka diperlukan pengetahuan, metoda dan pendekatan manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bidang manajemen yang secara khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan staf dalam suatu organisasi. Manusia selalu memainkan peran aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, aktor, dan penentu pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari manusia.

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. (Flipo, 1989)

Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. (French dalam Soekidjo, 1991)

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi menurut Handoko (2000;67)

Menurut Mutiara S.Pangabean Manajemen Sumber Daya Manusia itu ialah proses perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Malayu SP Siagian (2001;10) menjelaskan bahwa Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan dan dikutip agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan serta masyarakat.

Oleh karena itu Manajemen perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi.

5. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja dapat diartikan sebagai suatu kemampuan kerja, prestasi yang

diperlihatkan atau yang dicapai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan dalam periode tertentu

Kinerja menurut Payaman Simanjuntak (2005;106) adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan Manajemen kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja diperusahaan tersebut.

Menurut Wirawan (2012;5) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2004;67) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dalam Lijan Poltak Sinambela (2012;6) Riva'i Basri mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.

Kinerja ialah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencanaan pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi yang bersangkutan (Mangkuprawira dan Hubeis, 2007:153)

Sedangkan kinerja menurut Edison(2016) merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama menurut Robbins (dalam Sinambela 2012:5). Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika organisasi membutuhkan orang lain untuk dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, maka orang tersebut pun perlu mendapatkan imbalan sebagai wujud atas kinerjanya tersebut sehingga jika kedua hal tersebut terjalin dengan baik maka hubungan antara keduanya dapat saling menguntungkan.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Ada beberapa hal untuk mengukur kinerja pegawai dalam perusahaan atau organisasi menurut Robbins yaitu:

- a) Kualitas kerja
- b) Kuantitas kerja
- c) Konsistensi/kemampuan pegawai
- d) Sikap/perilaku pegawai

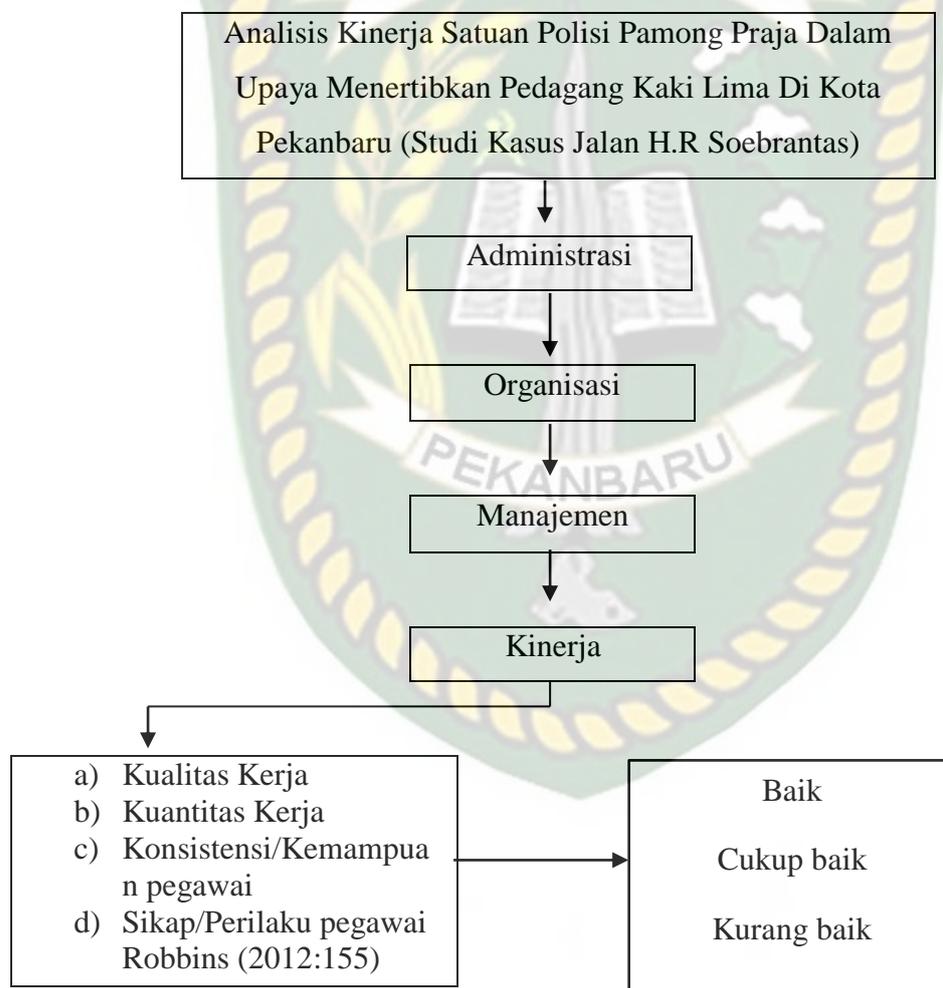
Dari penjelasan di atas dapat juga dikatakan bahwa kinerja pegawai di setiap instansi atau organisasi apa pun ditentukan oleh tingkat atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan pendapat yang berbeda tentang kinerja dan prestasi kerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu, yang disebabkan oleh keterampilan atau kemampuan alami yang diperoleh dari proses pembelajaran dan keinginan untuk berprestasi.

B. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Jalan H.R Soebrantas)” secara rinci dapat dilihat pada bagian bawah ini:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas).



Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

C. Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran

A. Konsep Operasional

Dengan konsep ini peneliti akan memberikan penafsiran yang mengaitkan pemikiran dalam analisa. Peneliti melaksanakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
2. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul demi melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan
3. Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan ilmu seni mengatur hubungan dan peranan dan dikutip agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan serta masyarakat.
5. Indikator Kinerja Menurut Robbins (2012:155) ada beberapa hal untuk mengukur kinerja pegawai dalam sebuah perusahaan atau organisasi yaitu :
 - a. Kualitas kerja
Kualitas Kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan
 - b. Kuantitas kerja

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan karyawan dan jumlah aktivitas yang dihasilkan

c. Konsistensi/kemampuan pegawai

Merupakan tingkat karyawan mempunyai konsistensi kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan persepsi karyawan dalam membina hubungan dengan perusahaan tanggung jawab, loyalitas terhadap perusahaan.

d. Sikap/perilaku pegawai

Tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun tanggapan seseorang terhadap pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami dilingkungan kerja serta perlakuan pimpinan terhadap orang dengan tipe ini.

6. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas Daerah Milik Jalan (DMJ/Trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang

menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang terdapat disepanjang jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Analisis Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas)

1	2	3	4	5
Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama menurut Robbins (dalam Sinambela 2012:5)	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas kerja 	a. Memberi tahu pedagang tidak boleh berjualan dibadan jalan b. Tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas. c. Menegakkan peraturan daerah dalam rangka penertiban pedagang kaki lima	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas Kerja 	a. Dilakukan razia rutin penertiban pedagang kaki lima b. Penurunan angka pelanggaran oleh pedagang c. Terciptanya tata tertib pada pedagang kaki lima	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan/konsistensi 	a. Mampu bersosialisasi pra-penertiban pedagang kaki lima b. Mampu mengedepankan rasa tentram, tertib dan nyaman.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

		<ul style="list-style-type: none"> • Sikap /Perilaku 	<p>c. Mampu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan ketertiban</p> <p>a. Tidak ada kekerasan dalam tindak penertiban pedagang kaki lima</p> <p>b. Tidak memicu kerusuhan dan berkata kotor dalam penertiban pedagang kaki lima</p> <p>c. Merespon keluhan pedagang kaki lima untuk dicarikan solusi dalam penertiban</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>
--	--	---	---	--

Sumber : Data Modifikasi Peneliti, 2020

C. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori: Baik, Cukup baik, Kurang baik.

a. Ukuran Variabel

Baik Apabila penilaian 66-100% dari seluruh Indikator Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas)

- Cukup Baik Apabila penilaian 34-66% dari seluruh indikator Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas)
- Kurang Baik Apabila penilaian 1-33% dari seluruh indikator Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas)

b. Variabel Indikator

1. Kualitas Kerja

- Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kualitas Kerja (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (67-100%)
- Cukup Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Cukup Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kualitas Kerja (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (34-66%)
- Kurang Baik Apabila Persentasi tertinggi pada kategori Kurang Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam kualitas kerja (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (1-33%)

2. Kuantitas Kerja

- Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya

Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kuantitas Kerja (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (67-100%).

Cukup Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Cukup Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kuantitas Kerja (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (66-34%)

Kurang Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Kurang Baik untuk menilai Analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kuantitas Kerja (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (1-33%).

3. Kemampuan/Konsistensi

Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota pekanbaru dalam Kemampuan/Konsistensi (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (67-100%).

Cukup Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Cukup Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kemampuan/Konsistensi (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (66-34%).

Kurang Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Kurang Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Kemampuan/Konsistensi (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (1-33%)

4. Sikap dan Perilaku

Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Sikap dan Perilaku (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (67-100%)

Cukup Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Cukup Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Sikap dan Perilaku (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (66-34%)

Kurang Baik Apabila persentasi tertinggi pada kategori Kurang Baik untuk menilai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dalam Sikap dan Perilaku(Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas) (1-33%)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe survei deskriptif dengan analisis kuantitatif. Yaitu untuk menggambarkan kebenaran dari apa yang terjadi pada saat peneliti dengan mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis data sehingga dapat menemukan kejadian relatif dan mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang hasil analisis.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dijelaskan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini karena instansi ini yang bertanggung jawab menjalankan ketertiban umum dan ketentraman yang ada diwilayah Pekanbaru

C. Populasi dan Sampel

- a. populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi ialah aparaturnya pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru khususnya staff yang ada Satpol PP Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Cut Nyakk Dien dan Jalan Jend. Sudirman

- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2010:62)

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Analisis Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas, Kec. Tampan atau dari JL Putri Tujuh–JL Purwodadi) Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.	1	1	100%
3	Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat	1	1	100%
4	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	60	20	33%
5	Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru	75	30	40%
	Jumlah	138	53	38%

Keterangan : Data Olahan Penulis 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut.

Sampel dalam penelitian ini: untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bidang Operasi dan Ketertiban Umum, Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat penulis menggunakan teknik penarikan sampel sensus adapun penarikan sampel sensus ialah teknik penarikan sampel dengan menarik seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel

Untuk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, penulis menggunakan *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, karena tidak banyaknya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang turun langsung ke lapangan

Dan untuk Pedagang Kaki Lima penulis menggunakan teknik *accidental sampling* ialah teknik penarikan sampel dengan cara menggunakan siapa saja yang kebetulan ditemui dilokasi peneliti yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai data yang kita butuhkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Data Primer* Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.

2. *Data Sekunder* adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung dalam bentuk buku, dokumen, bukti atau arsip yang sudah ada sebelumnya yang telah diterbitkan dan tidak dipublikasikan.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Quisioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan pertanyaan untuk mendapatkan data mengenai Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas).

b. Wawancara

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang sedang diwawancarai untuk mendapatkan informasi serta melengkapi bahan yang diinginkan yang dianggap perlu dalam penelitian ini

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan

d. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk dokumen.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan untuk penelitian ini telah dikumpulkan, data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam masing-masing variabel. kemudian dianalisis secara kuantitatif yang dimana hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase dan dilengkapi dengan uraian dan informasi pendukung, sehingga dapat diambil kesimpulan.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal waktu pelaksanaan penelitian tentang Analisis Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R Soebrantas)

no	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Kuisisioner																												
5	Rekomendasi Survey																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																												
9	Konsultasi Revisi																												
10	Ujian Konfrehensif																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

I. Rencana sistematika laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisi penguraian atau penjelasan dari pengertian, definisi konsep dan teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dilanjutkan dengan Kerangka Pikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, dan Teknik Pengukuran Variabel.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini berisikan Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis

Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Dengan luas sekitar 632.26 km² secara astronomis terletak diantara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14'-101° 34' Bujur Timur. Dengan batas wilayah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- Dibagian Utara Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Dibagian Timur Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Dibagian Selatan Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Dibagian Barat Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Dahulu Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689 telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana diperjanjian tersebut Belanda diberi hak yang luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis

dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan Kawasan yang maju dan sangat penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Petapahan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditif perdagangan baik dari luar untuk di angkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh, Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura semenjak Sultan Abdul Jalil Amaluddin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Kemudian Sultan berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Usahanya tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204H bersamaan dengan 23 Juni 1784M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggalkan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar, Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

2. Keadaan Penduduk

Kota Pekanbaru merupakan Kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sector pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah Suku Melayu, Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti Suku Jawa, Batak, Minang dan Sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018

no	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	146.960	138.972	285.932

2	Payung Sekaki	46.476	44.426	90.902
3	Bukit Raya	53.757	49.965	103.722
4	Marpoyan Damai	68.104	63.258	131.362
5	Tenayan Raya	83.837	78.693	162.530
6	Sail	10.994	11.021	22.015
7	Sukajadi	24.115	24.429	48.544
8	Rumbai	35.370	32.200	65.570
9	Lima Puluh	21.138	21.331	42.469
10	Pekanbaru Kota	13.032	12.687	25.719
11	Senapelan	18.590	18.869	37.459
12	Rumbai Pesisir	37.544	35.320	72.864
Jumlah		559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebanyak 1.091.088 yang terdiri dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, dan berikut ini jumlah data penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	57.467	52.551	110.018

5-9	50.281	46.149	96.430
10-14	45.936	42.572	88.513
15-19	51.290	52.497	103.787
20-24	62.368	61.252	123.620
25-29	53.560	50.689	104.249
30-34	47.116	45.895	93.001
35-39	44.801	43.317	88.118
40-44	41.152	38.297	79.449
45-49	34.885	30.560	65.445
50-54	26.061	23.175	49.239
55-59	18.971	17.780	36.751
60-64	11.895	10.464	22.359
65+	14.134	15.968	30.102
Total	559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 123.620 jiwa dan jumlah penduduk yang paling banyak berikutnya terdapat pada umur 0-4 tahun sebanyak 110.018 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada umur 60-64 tahun yaitu sebanyak 22.359 jiwa pada tahun 2018.

3. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat langsung oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada Kantor Gubernur Kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing-masing Kepala Seksi Kota Pekanbaru

Tabel IV.3: Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	Kecamatan Tampan	Simpang Baru Sidomulyo Barat	Tuah Karya Delima
2	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur/Tampan	Air Hitam Labuh Baru Barat
3	Kecamatan Bukit Raya	Simpang Tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
4	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang Empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka ramai Kota tinggi
9	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung Dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung Tengah Kampung Melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau Koran
11	Kecamatan Rumbai	Limbun Sari Muara Fajar	Rumbai Bukit Palas Sri Meranti
12	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pendek Limbungan Lembah Sari	Lembah Damai Limbungan Baru Tebing Tinggi Okura

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2018

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah Tanggung Jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa* yang berfungsi untuk mewedahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasmen Polisi sebagai penjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958 lembaga ini berubah nama menjadi Detasmen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU N0.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama

lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No.5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 148 UU No.32 Tahun 2004 disebutkan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai Pelaksanaan tugas Desentralisasi.

1. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a) Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang Tenram, Tertib, dan Taat Hukum. Dalam pernyataan tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin.
3. Taat Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraa terdapat

ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b) Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta melindungi masyarakat.

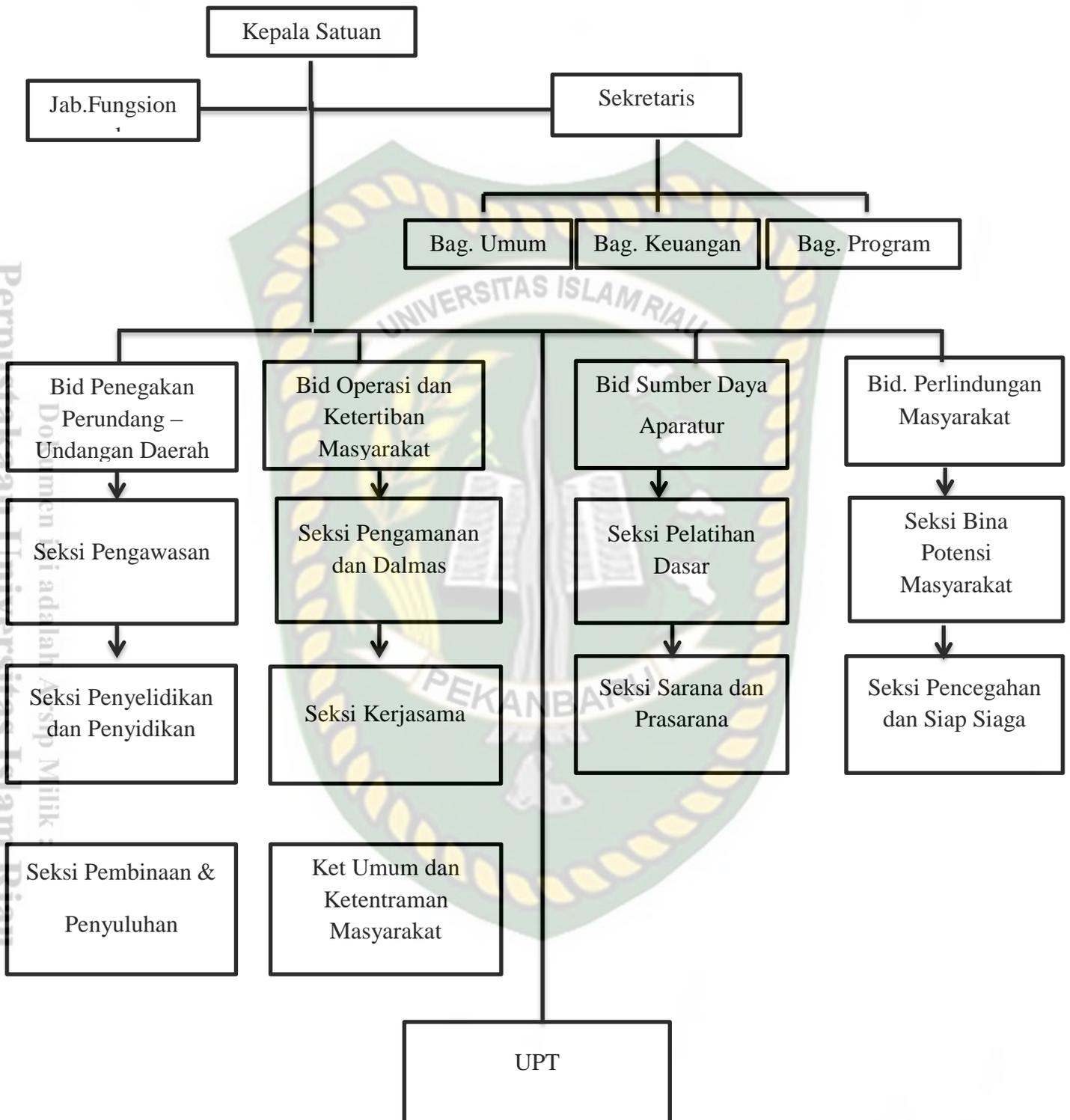
Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.

2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan Perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
- b) Pelaksanaan Koordinasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c) Penyusunan dan Pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- d) Pelaksanaan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negri Sipil daerah/Aparatur lainnya.
- e) Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f) Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pemerintah Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
- g) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

3. Struktur Organisasi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karna dari penelitian ini mengangkat masalah tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan Wawancara serta menyebarkan Kuesioner yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjumlah 20 orang, Pedagang Kaki Lima Khususnya jalan HR.Soebrantas 30 orang.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk memperoleh penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis juga menilai bahwa pentingnya untuk mengetahui usiaa dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian tersebut. Berikut ini merupakan penjelasn lebih lanjut tentang identitas responden dalam penelitian ini:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) serta dengan penyebaran Kuesioner, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan Jenis Kelamin adalah berikut ini:

Tabel V.1: Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Staff Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	Laki-Laki	13	65%
2	Perempuan	7	35%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2020

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) yang adalah dominan nya Laki-Laki yang berjumlah 13 orang dengan persentase 65% sedangkan untuk Pegawai yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 7 orang dengan persentase 35% dan total keseluruhan 20 orang yang dijadikan sebagai sampel.

Tabel V.2: Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	Laki-Laki	20	67%
2	Perempuan	10	33%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2020

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Pedagang Kaki Lima yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) yang adalah dominan nya Laki-Laki yang berjumlah 20 orang dengan persentase 67% dan sedangkan untuk pedagang kaki

lima yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 10 orang dengan persentase 33% dari total keseluruhan 30 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas kedua yang penulis peroleh dari hasil lapangan adalah identitas responden mengenai usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berpikirnya tentu sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki usia matang. Dari hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) serta dengan cara penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan usia dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel V.3: Identitas Responden Menurut Usia Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	20-30 Tahun	10	50%
2	31-40 Tahun	7	35%
3	41-50 Tahun	3	15%
4	>50 Tahun	0	0
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2020

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, responden yang paling banyak memiliki usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase 50% dan jumlah yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 35% dan yang terakhir yang

memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 15% . Hal ini dikarenakan untuk Pegawai yang bertugas dilapangan, usianya memang harus lebih muda, karena mereka fisiknya lebih kuat dibandingkan usianya yang 30 ke atas.

Tabel V.4: Identitas Responden Menurut Usia Pedagang Kaki Lima

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	20-30 Tahun	7	23%
2	31-40 Tahun	18	60%
3	41-50 Tahun	5	17%
4	>50 Tahun	0	0
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2020

Dari tabel V.4 dinyatakan bahwa responden dari PKL, responden yang paling banyak memiliki usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 60%, dan jumlah yang memiliki usia 20-30 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 23% dan yang terakhir yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 5 orang dengan persentase 17% jadi total keseluruhan dari jumlah Pedagang Kaki Lima berdasarkan usia yang dijadikan sampel adalah sebanyak 30 orang

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) serta dengan cara penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5: Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	SD	-	0%
2	SMP	-	0%
3	SMA	12	60%
4	Diploma I/II/III	5	25%
5	Sarjana S1/S2	3	15%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2020

Dari tabel V.5 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dominan nya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 12 orang dengan 60% sedangkan Pegawai yang memiliki Pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 5 Orang dengan 25% dan yang terakhir Sarjana S1/S2 sebanyak 3 orang dengan persentase 15%. Jadi total keseluruhan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel sebanyak 20 orang

Tabel V.6: Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Pedagang Kaki Lima

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase%
1	SD	-	-
2	SMP	8	27%
3	SMA	17	56%

4	DiplomaI/II/III	2	7%
5	Sarjana S1/S2	3	10%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2020

Dari tabel V.6 dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir Pedagang Kaki Lima yang dijadikan sampel pada penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) dominannya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 17 orang dengan persentase 56% responden yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 8 orang dengan persentase 27%, responden yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana S1/S2 sebanyak 3 orang dengan persentase 10% dan responden yang memiliki pendidikan terakhir DiplomaI/II/III 2 orang dengan persentase 7%.

B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong 2013 : 131) Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan HR.Soebrantas) dan indikator-indikator yang penulis gunakan dalam mencari hasil penelitian ini adalah : Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Konsistensi/Kemampuan Pegawai, Sikap/Perilaku Pegawai. Dan didalam setiap indikator akan dilengkapi dengan sub indikator yang berguna untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan

hasil penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator maka penulis akan membahas tentang Kualitas Kerja dalam bentuk tabel

1. Kualitas Kerja

Kualitas Kerja ini dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

Didalam indikator ini ada 3 item penilaian yang dilakukan yaitu pertama memberi tahu pedagang tidak boleh berjualan dibadan jalan, yang kedua tidak terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan yang terakhir adalah menegakkan peraturan daerah

Tabel V.7: Tanggapan Responden Staf Pegawai Terhadap Indikator Pertama

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberi tahu pedagang tidak boleh berjualan dibadan jalan	6 (30%)	10 (50%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas	4 (20%)	12 (60%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Menegakkan peraturan daerah dalam rangka penertiban pedagang kaki lima	7 (35%)	10 (50%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		17	32	11	60
Rata-rata		6	10	4	20
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pegawai pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah rata-rata 10 orang dengan persentase 50% karena kurangnya sosialisasi diantara para pedagang kaki lima dan pihak anggota satuan polisi pamong praja mengenai peraturan larangan berjualan dipinggiran jalan yang sudah dibuat sedangkan yang memberikan kategori “Baik” rata-rata 6 orang dengan persentase 30% dan kategori “Kurang Baik” rata-rata 4 orang dengan persentase 20%.

Tabel V.8: Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Indikator Pertama

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberi Tahu Pedagang Tidak Boleh Berjualan Dibadan Jalan	10 (33%)	15 (50%)	5 (17%)	30 (100%)
2	Tidak Terjadi Penyimpangan Dalam menjalankan tugas	12 (40%)	13 (43%)	5 (17%)	30 (100%)
3	Menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima	5 (17%)	20 (66%)	5 (17%)	30 (100%)
Jumlah		27	48	15	90
Rata-rata		9	16	5	30
Persentase		30%	53%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Dari hasil tabel V.8 diatas bahwa jawaban yang dominan berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah rata-rata 16 orang dengan persentase 53%. Ini di

karenakan ada Pedagang Kaki Lima yang tidak mengetahui kegiatan ataupun program yang sudah ditetapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga mereka masih berani berjualan dipinggiran jalan dan ada juga Pedagang yang mengetahui tetapi tidak terlalu peduli terhadap kegiatan ataupun program yang sudah dibuat ini dikarenakan sanksi yang tidak terlalu berat, sedangkan yang menjawab dengan kategori “Kurang Baik” rata-rata 5 orang dengan jumlah persentase 17% dan kategori “Baik” rata-rata 9 orang dengan jumlah persentase 30% .

Untuk melengkapi jawaban diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Bapak Hendry Dony menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

“Kami sudah memberi tahu kepada para pedagang yang berjualan disana bahkan masalah ini sudah berulang kali diulang terus menerus, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan patroli penertiban terhadap pedagang kaki lima tersebut, bahkan pernah beberapa kali bentrok dengan para pedagang yang berjualan disana, setelah melakukan penertiban tersebut daerah yang dijadikan tempat berjualan kami ubah menjadi taman dan hasilnya sama saja mereka kembali lagi berjualan ditempat tersebut, padahal pemerintah Kota Pekanbaru sudah memberikan tempat mereka berjualan untuk Pedagang Kaki Lima yang ada didaerah tersebut” (Wawancara Tanggal 11 Januari 2021, dengan Bapak Hendry Dony Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat)

Selain dari pernyataan yang diberikan, penulis melakukan Observasi secara langsung dengan perwakilan Staff Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, dimana hasil wawancara yang penulis dapat adalah sebagai berikut:

“Tentunya kami mengikuti tahapan yang sudah diatur oleh Satuan kita, tidak langsung main gusur ataupun bertindak secara anarkis, kita memiliki SOP yang jelas dan ada berapa tahapan yang dilakukan, dimulai dari peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga yang terakhir barulah

dengan penertiban secara paksa, ini pernah dilakukan beberapa kali sehingga membuat bentrok dengan para pedagang kaki lima didaerah tersebut” (Wawancara Tanggal 11 Januari 2021 salah satu Staff Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Hasil Observasi dilapangan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugas dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas tersebut dan para pedagang melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang demi kehidupan mereka.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas Kerja merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan karyawan dan jumlah aktivitas yang dihasilkan

Di dalam indikator kedua ini ada 3 item penilaian yang dilakukan, pertama, apakah sudah melakukan razia pedagang kaki lima secara rutin. Kedua, apakah ada penurunan angka pelanggaran oleh pedagang. Ketiga, apakah sudah terciptanya tata tertib pada pedagang kaki lima.

Tabel V.9: Tanggapan Responden Staf Pegawai Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Razia rutin Penertiban Pedagang Kaki Lima	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Penurunan Angka Pelanggaran	10 (50%)	7 (35%)	3 (15%)	20 (100%)

	Pedagang				
3	Terciptanya Tata Tertib pada Pedagang Kaki Lima	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
	Jumlah	50	7	3	60
	Rata-rata	17	2	1	20
	Persentase	85%	10%	5%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Pada tabel V.9 bahwa jawaban yang diberikan oleh Staff Pegawai Kategori “Baik” rata-rata sebanyak 17 orang dan persentase 85%, Kategori “Cukup Baik” rata-rata sebanyak 2 orang dengan persentase 10% dan kategori “Kurang Baik” rata-rata sebanyak 1 Orang dengan persentase 5%.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tanggapan atau penilaian dominan yang diberikan staf pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada kategori “Baik”, hal ini karena pihak pegawai dinas Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan melakukan razia secara rutin sehingga terjadinya penurunan angka pelanggaran terhadap para pedagang dan terciptanya tata tertib pada pedagang kaki lima.

Tabel V.10: Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Razia rutin penertiban pedagang kaki lima	5 (17%)	18 (60%)	7 (23%)	30 (100%)
2	Penurunan angka pelanggaran	8	15	7	30

	pedagang	(27%)	(50%)	(23%)	(100%)
3	Terciptanya tata tertib pada pedagang kaki lima	3 (10%)	20 (67%)	7 (23%)	30 (100%)
	Jumlah	16	53	21	90
	Rata-Rata	5	18	7	30
	Persentase	17%	60%	23%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Pada tabel V.10 dapat dilihat bahwa Pedagang yang memberi tanggapan dengan kategori “Cukup Baik” rata-rata 18 orang dengan persentase 60%. Ini menunjukkan bahwa anggota satuan polisi pamong praja tidak rutin melakukan razia dilokasi tempat mereka berjualan tersebut, sehingga masih banyaknya para pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang tersebut dan membuat angka pelanggaran pedagang kaki lima makin naik. Sedangkan untuk kategori “Baik” rata-rata 5 orang dengan persentase 17% dan kategori “Kurang Baik” rata-rata 7 orang dengan persentase 23%.

Untuk melengkapi jawaban yang penulis dapatkan, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuesioner dengan Bapak Hendry Dony yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

“Mengenai tentang Tata Tertib salah satu misi Satpol PP Kota Pekanbaru itu adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan terwujudnya ketertiban lingkungan, mengenai tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima ini, Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan kegiatannya dengan melakukan razia penertiban supaya dagangan mereka bisa tertata dengan rapi tidak mengganggu ketertiban umum. Dan kami masih berusaha untuk memberi kesadaran kepada para pedagang supaya mematuhi peraturan yang sudah dibuat ini. (Wawancara tanggal 11 Januari 2021, dengan Bapak Hendry Dony Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat)

Selain dari pernyataan wawancara tersebut, penulis telah melakukan Observasi langsung dan wawancara secara langsung Kepada Staf Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dimana hasil wawancara tersebut yaitu:

“Kami selalu melakukan razia penertiban dengan mengikuti peraturan yang ada dan dari banyaknya kasus penertiban yang dilakukan, semua berawal dari ketidaktaatan para Pedagang terhadap aturan dan peringatan yang sudah diberikan sebelumnya (Wawancara tanggal 11 Januari 2021 dengan salah satu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan Observasi lapangan, penulis menemukan fakta bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan yang ada, namun para pedagang tetap tidak mengikuti peraturan tersebut sehingga masih banyak para pedagang yang berjualan ditepi jalan tersebut

3. Kemampuan/Konsistensi

Kemampuan/Konsistensi merupakan tingkat karyawan yang mempunyai konsistensi kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan, pengukuran dengan menggunakan persepsi karyawan dalam membina hubungan dengan perusahaan dan tanggung jawab loyalitas terhadap perusahaan

Dalam indikator ini ada 3 item penilaian yang dilakukan yaitu, pertama apakah sudah bersosialisasi pra penertiban kepada pedagang kaki lima. Kedua, apakah mampu mengedepankan rasa tentram, tertib, dan nyaman. Ketiga, mampu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menciptakan ketertiban.

Tabel V.11: Tanggapan Responden Staff Pegawai Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran	Jumlah
----	---------------	-----------------	--------

		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mampu bersosialisasi pra penertiban pedagang kaki lima	10 (50%)	5 (25%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Mampu mengedepankan rasa tentram, tertib dan nyaman	10 (50%)	6 (30%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Mampu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan ketertiban	12 (60%)	4 (20%)	4 (20%)	20 (100%)
Jumlah		32	15	13	60
Rata-rata		11	5	4	20
Persentase		55%	25%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel diatas dijelaskan pegawai dominan memberikan tanggapan dengan Kategori “Baik” Rata-Rata sebanyak 11 orang dengan persentase 55%, untuk kategori “Cukup Baik” rata-rata 5 orangn dengan persentase 25% dan kategori “Kurang Baik” rata-rata 4 orang dengan persentase 20%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dapat di kategorikan “Baik” dengan persentase 55%, Dalam hal ini pihak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugasnya selalu bersosialisasi dengan para pedagang mengenai aturan yang ditetapkan agar para pedagang tidak berjualan sembarangan tempat dan menciptakan rasa tentram dan tertib .

Tabel V.12: Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mampu bersosialisasi pra penertiban pedagang kaki lima	4 (13%)	18 (60%)	8 (27%)	30 (100%)
2	Mampu mengedepankan rasa tentram, tertib dan nyaman	4 (13%)	18 (60%)	8 (27%)	30 (100%)
3	Mampu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan ketertiban	13 (43%)	9 (30%)	8 (27%)	30 (100%)
Jumlah		21	45	24	90
Rata-rata		7	15	8	30
Persentase		23%	50%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel V.12 diatas dapat kita lihat bahwa dari seluruh jumlah responden 30 orang atau 100% jawaban responden pada kategori “Baik” Rata-rata 7 orang dengan persentase 23%, pada kategori “Cukup Baik” rata-rata 15 Orang dengan persentase 50% dan pada Kategori “Kurang Baik” rata-rata 8 orang dengan persentase 27%.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan

“Cukup Baik” dengan persentase 50%, dikarenakan para pedagang merasa pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan tugasnya dengan benar para pedagang kaki lima belum merasakan yang namanya sosialisasi antara para pedagang dan anggota satuan polisi pamong praja sehingga membuat para pedagang berani untuk melakukan berjualan di pinggir jalan

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis menyajikan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Hendry Dony yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

“Sosialisasi kepada para pedagang kaki lima pastinya ada dan sosialisasi itu memiliki dampak yang bersifat sementara, pada dasarnya masyarakat yang berjualan disana tidak akan mau kehilangan pelanggannya, dan yang menjadi kendalanya adalah masyarakat yang membeli juga tidak mau repot-repot untuk mencari toko yang menjual dagangan yang ingin dicarinya, dan ketika masyarakat melihat ada yang berjualan dipinggiran jalan maka mereka akan berhenti untuk membeli dagangan tersebut. Hal seperti inilah yang menjadi penyebab permasalahan, karena lokasi berjualan dan untuk transaksi yang dilakukan persis ditepian jalan dan secara otomatis akan mengganggu pengguna jalan lain dan akan menghambat kelancaran lalu lintas di daerah tersebut maka dari itu sosialisasi tersebut hanya berdampak sementara karena cukup dengan hitungan hari saja mereka akan kembali melakukan aktivitas berdagang dilokasi yang sudah dilarang tersebut.(Wawancara Tanggal 11 Januari dengan Bapak Hendry Dony Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat)

Dari hasil observasi penulis lakukan dapat di ketahui yaitu, proses sosialisasi yang dilakukan tidak memiliki dampak yang mengacu kepada perubahan ketertiban, yang dimana para pedagang pasti akan melakukan aktivitas berdagang dilokasi yang sama setelah berapa hari dari proses sosialisasi yang dilakukan dan seharusnya pemerintah memberikan pilihan kepada pedagang agar mereka memiliki tempat untuk mencari nafkah melalui proses berdagang.

4. Sikap/Perilaku

Sikap/Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami dilingkungan kerja serta perlakuan pimpinan terhadap orang dengan tipe ini.

Dalam indikator terakhir ini ada 3 item penilaian yaitu pertama, tidak ada kekerasan dalam tindak penertiban pedagang. Kedua, tidak memicu kerusakan dan berkata kotor. Ketiga, apakah merespon keluhan para pedagang untuk dicarikan solusi dalam penertiban.

Tabel V.13: Tanggapan Responden Staff Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tidak ada kekerasan dalam penertiban pedagang kaki lima	5 (25%)	9 (45%)	6 (30%)	20 (100%)
2	Tidak memicu kerusakan dan berkata kotor dalam penertiban pedagang kaki lima	10 (50%)	6 (30%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Merespon keluhan pedagang kaki lima untuk dicarikan solusi dalam penertiban	9 (45%)	8 (40%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		24	23	13	60
Rata-Rata		8	8	4	20
Persentase		40%	40%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan pada tabel V.13 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang paling dominan memberikan tanggapan pada kategori “Baik” rata rata 8 orang dengan persentase 40% untuk kategori “Cukup Baik” rata-rata 8 orang dengan persentase 40% dan yang untuk kategori “Kurang Baik” rata-rata 4 Orang dengan Persentase 20%. Ini dikarenakan Staff Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan baik tidak memicu kerusuhan dalam penertiban pedagang kaki lima dan merespon keluhan-keluhan dari para pedagang kaki lima untuk dicarikan solusi tempat berjualan yang memenuhi aturan yang ditetapkan sehingga para pedagang bisa berjualan dengan aman.

Tabel V.14: Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tidak ada kekerasan dalam penertiban pedagang kaki lima	12 (40%)	13 (43%)	5 (17%)	30 (100%)
2	Tidak memicu kerusuhan dan berkata kotor dalam penertiban pedagang kaki lima	10 (33%)	8 (27%)	12 (40%)	30 (100%)
3	Merespon keluhan pedagang kaki lima untuk dicarikan solusi dalam penertiban	5 (17%)	12 (40%)	13 (43%)	30 (100%)
Jumlah		27	33	30	90
Rata-Rata		9	11	10	30
Persentase		30%	37%	33%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel V.14 diatas dapat dilihat bahwa pedagang yang memberikan tanggapan paling dominan berada pada kategori “Cukup Baik” dengan rata rata 11 orang persentase 37%. Ini menunjukkan bahwa pedagang menilai anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat menerima semua keluhan dari pedagang kaki lima untuk mencari solusi mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat berdagang. Sedangkan untuk kategori “Baik” rata-rata 9 Orang dengan persentase 30% dan kategori “Kurang Baik” rata-rata 10 Orang dengan persentase 33%.

Untuk melengkapi jawaban diatas penulis akan menyajikan wawancara, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara yang penulis lakukan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Bapak Hendry Dony yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara yang penulis dapat sebagai berikut:

“Kita tetap memberikan solusi kepada para pedagang, kita juga sediakan lokasi tempat mereka berjualan kita arahkan mereka ketempat yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti di pasar pagi arengka, tetapi memang pada dasarnya Pedagang Kaki Lima tersebut tidak berniat untuk pindah dan selalu melakukan perlawanan ketika kita mendatangi mereka, kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja selalu menjalan tugas dengan berlandaskan kemanusiaan bersifat manusiawi dengan memberikan himbauan arahan dan menyediakan sarana yang dibutuhkan, permasalahannya di lapangan jauh lebih sulit untuk dijalankan karena tidak sepahaman antara anggota satuan dan para pedagang kaki lima”(Wawancara dengan Bapak Hendry Dony Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada tanggal 11 Januari 2021)

Berdasarkan Observasi penulis menemukan fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugasnya dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan dengan tidak melakukan kekerasan dan Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah memberikan

solusi tentang tempat lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan buat para pedagang kaki lima hanya saja para pedagang lah yang tidak mau untuk pindah

Tabel V.15 : Rekapitulasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kualitas Kerja	15 (30%)	26 (52%)	9 (18%)	50 (100%)
2	Kuantitas Kerja	22 (44%)	20 (40%)	8 (16%)	50 (100%)
3	Kemampuan/Konsistensi	18 (36%)	20 (40%)	12 (24%)	50 (100%)
4	Sikap/Perilaku	17 (34%)	19 (38%)	14 (28%)	50 (100%)
Jumlah		72	85	43	200
Rata-Rata		18	21	11	50
Persentase		36%	42%	22%	100%
Kategori		Cukup Baik			

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel diatas maka disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru mendapatkan rata-rata Cukup Baik dengan jumlah 85 Orang dengan persentase 42% sedangkan yang mendapatkan kategori Kurang Baik rata-rata 11 orang dengan persentase 22% dan yang mendapatkan kategori Baik 18 orang dengan persentase 36%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru berada pada kategori Cukup Baik dengan berdasarkan persentase yang telah ditentukan penulis.

C. Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

Dari analisa diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai beberapa hambatan terkait Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru:

1. Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru kepada masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima tentang lokasi-lokasi yang sudah dilarang untuk berjualan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para pedagang yang tidak mengetahui jika berjualan ditempat yang sudah dilarang sehingga ketika anggota satuan melakukan penertiban masih banyaknya para pedagang melakukan protes.
2. Kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat lokasi yang sudah dilarang sehingga melanggar aturan tentang Ketertiban Umum. Hal ini dilihat dari keadaan dilapangan yang masih ada Pedagang yang berjualan dilokasi yang dilarang meski pihak anggota satuan sudah sering melakukan razia di daerah tersebut.
3. Masih kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengembalian barang Pedagang Kaki Lima yang dimana barang dagangan para pedagang telah disita oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dilihat dari gerobak serta barang dagangan yang menumpuk di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mengatakan sulit untuk memberikan efek jera kepada para pedagang agar pedagang tersebut tidak berjualan lagi

ditepian jalan yang sudah dilarang, salah satu faktor yang mempengaruhinya ialah kurangnya tempat untuk para pedagang berjualan karena itulah dibutuhkan peran pemerintah daerah supaya menyediakan tempat atau lokasi untuk para Pedagang Kaki Lima berjualan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis yang telah dilakukan oleh penulis tentang Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Kualitas Kerja dalam Kategori penilaian Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada di Kategori “Cukup Baik” yang artinya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan terjadi penyimpangan di dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk kategori penilaian Responden Pedagang Kaki Lima ada di Kategori “Cukup Baik” yang artinya Pedagang Kaki Lima merasa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
2. Untuk Indikator Kuantitas Kerja dalam Kategori penilaian Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada di Kategori “Baik” yang artinya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan tugasnya mengikuti dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk kategori penilaian Responden Pedagang Kaki Lima ada di Kategori “Cukup Baik” yang artinya Pedagang Kaki Lima merasa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan razia secara rutin sehingga para pedagang masih banyak yg berjualan di tepian jalan.
3. Untuk Indikator Kemampuan/Konsistensi dalam Kategori penilain Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada Kategori

“Baik” yang artinya pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugas penertiban dengan baik secara bersosialisasi kepada para Pedagang. Sedangkan kategori penilaian Responden untuk Pedagang Kaki Lima berada di Kategori “Cukup Baik” yang artinya para pedagang memang sudah bersosialisasi kepada anggota Satpol PP tetapi belum menemukan solusi lokasi untuk berjualan.

4. Untuk Indikator Sikap/Perilaku dalam Kategori penilaian Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada Kategori “Baik” karena sudah melakukan tugas dengan tidak memakai kekerasan dalam penertiban pedagang. Sedangkan kategori penilaian Responden untuk Pedagang Kaki Lima berada pada kategori “Cukup Baik” karena para pedagang merasa anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut tidak merespon keluhan pedagang kaki lima untuk dicarikan solusi mengenai lokasi berjualan

Dari seluruh hasil pengamatan yang penulis lakukan melalui Observasi dengan cara menyebarkan Kuesioner serta Wawancara yang dilakukan terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru **“Cukup Baik”** karena pihak satuan polisi pamong praja tidak melakukan razia rutin, melakukan razia hanya ketika mendapat pengaduan dari masyarakat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan dikarenakan sanksi yang kurang tegas sehingga mereka tetap berjualan di badan jalan, masih banyaknya juga pedagang yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang yang berjualan dipinggir jalan

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang peneliti buat berdasarkan hasil keseluruhan penelitian tersebut:

1. Kepada Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus lebih maksimal dalam melakukan razia penertiban Pedagang Kaki Lima serta lebih tegas dalam memberi sanksi kepada Pedagang Kaki Lima.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya menyediakan lokasi untuk para Pedagang Kaki Lima agar pedagang tidak berjualan lagi ditepian jalan yang sudah dilarang dikawasan tersebut.
3. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima agar mereka tahu tentang peraturan ketertiban umum agar mencari lokasi yang tidak melanggar peraturan ketertiban umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, 2002. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syafie, Inu Kencana (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian, P.Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Prenhallindo
- Wibowo. 2007. *Manajemen kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Prawirosntono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta
- Kumorotomo, Wahyu. 2007. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Yussa, Tarmizi, Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*.
Marpoyan Tujuh, Pekanbaru
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT
Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Bandung:
Alfabeta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang administrasi publik*. Erlangga Tangkilisan, (2005).
Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia
- Zulkifli & Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
Publishing

- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Mahmudi . 2005. *Manajemen kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja: Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Zukifli, Dkk, 2013. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru. Fisipol UIR
- Uha, nawawi, ismail, 2015. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Jakarta, Prenada media group
- Hasibuan, malayu, 2010. *Organisasi Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia dan Motivasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Hasibuan, malayu, 2001. *Kinerja dan Prestasi Kerja*, Jakarta. Gramedia.
- Ruky, Ahmad.2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
- Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 Tentang K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan).

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 PP 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Undang-Undang Nomor 32 Tentang pemerintah Daerah

